

**KHASANAH KEDAULATAN DALAM REGIONALISME
DI ERA GLOBALISASI
(Studi Kasus Implementasi ACFTA Di Indonesia)**

Rindu SM Firdaus

Email: Jurnal_tannas@ugm.ac.id

ABSTRACT

This paper explained the state sovereignty in globalization context, the qualitative data showed globalization practice paradox on economic resilience and Indonesia national security. The economic terms showed the ACTFA had weakened wealth values and state sovereignty. However globalization also had chances for a state to enhance its economic fortune with trading efficiency enhancement and global market extension. Economic cooperation especially in free trade regionalism would enhance the burgeoning position due the open cooperation of the global powers such as China with ACTFA. The security terms showed economic transformation into modern imperialism devices as the power activator and others pressure, which named as capitalist imperialism.

Keywords: *State Sovereignty, Regionalism, ACTFA, and Globalization.*

ABSTRAK

Tulisan ini menjelaskan seputar kedaulatan Negara dalam konteks globalisasi. Dengan menggunakan data kualitatif, tulisan ini menunjukkan bahwa terdapat paradoks praktek globalisasi terhadap ketahanan ekonomi dan keamanan nasional Indonesia. Dari segi ekonomi ditemukan bahwa ACFTA telah melemahkan nilai-nilai kesejahteraan dan kedaulatan nasional. Akan tetapi, di sisi lain globalisasi juga mengandung peluang bagi sebuah negara untuk meningkatkan keuntungan ekonomi melalui peningkatan efisiensi perdagangan dan perluasan pangsa pasar global. Kerjasama ekonomi terutama dalam bentuk regionalisme perdagangan bebas juga mengandung kesempatan untuk meningkatkan posisi tawar juga semakin besar karena keterbukaan terhadap kerjasama dengan kekuatan-kekuatan global seperti China melalui ACFTA. Dari segi keamanan ditemukan bahwa ekonomi bertransformasi menjadi alat imperialisme masa kini sebagai penggerak kekuasaan dan penekan pihak lain, yang disebut sebagai *capitalist imperialisme*.

Kata Kunci: *Kedaulatan Negara, Regionalisme, ACFTA, dan Globalisasi.*

PENGANTAR

Kedaulatan negara dalam menentukan kepentingan nasional mendapat tantangan karena kepentingan antar bangsa menjadi saling terkait erat seiring dengan perkembangan pesat praktek globalisasi seperti ACFTA.

Mekanisme globalisasi yang mengikat negara-negara dalam badan internasional maupun regional membuat pemerintahan nasional tidak lagi menjadi aktor tunggal dalam menentukan kebijakan dalam negeri. Masing-masing negara anggota yang terikat dalam suatu

kerjasama harus saling mempertimbangkan pendapat dan persetujuan dari negara anggota lainnya. ACFTA menjadi penting bagi Indonesia terkait permasalahan prospek ekonomi dan politik. Dengan menjalin perdagangan bebas dengan China. Indonesia memiliki kesempatan melebarkan pangsa pasar ke negara berpenduduk terbanyak di dunia. Di sisi politik, dengan terjalinnya hubungan persahabatan yang lebih erat dengan China sebagai salah satu kekuatan global baru, diharapkan hal tersebut dapat menaikkan posisi tawar Indonesia di pergaulan politik internasional. (Mas'ood, 1994 & 1998; Stiglitz, 2002)

Unsur kekuatan dalam negeri Ketahanan nasional Indonesia merupakan kekuatan nasional sebagai sebuah bangsa untuk menghadapi berbagai tantangan sekaligus peluang sebagai bangsa untuk mencapai kepentingan nasional. Unsur kekuatan gatra ekonomi dan keamanan merupakan dua gatra yang penting bagi kekuatan ketahanan nasional secara keseluruhan yang juga didukung oleh gatra-gatra lainnya, yaitu geografi, sumber daya alam (SDA), demografi, ideologi, politik, serta sosial dan budaya. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kondisi sosial budaya yang cukup kompleks karena keanekaragaman suku bangsa. Kondisi sosial budaya. (Lemhanas, TT).

Indonesia yang diharapkan adalah kondisi yang mampu menopang kekuatan ketahanan nasional Indonesia berupa keadaan masyarakat Indonesia yang berdasarkan ideologi Pancasila. Indonesia berada pada posisi lalu lintas internasional baik melalui laut maupun udara. Oleh karena itu, Indonesia memiliki peran strategis sebagai pengawas dan pengatur lalu lintas internasional. Posisinya yang berada di wilayah katulistiwa membuat Indonesia

menjadi negara tropis yang subur akan SDA yang berasal dari pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, peternakan, serta perkebunan. Kekayaan alam Indonesia juga didukung dari sektor pertambangan dan energi.

Indonesia merupakan negara berpenduduk padat yang berpotensi sebagai kekuatan sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pembangunan nasional. Permasalahan dasar dari demografi Indonesia yaitu kurangnya kualitas sektor pendidikan dan kesehatan yang membuat kualitas SDM tidak sebanding dengan kuantitas.

Hasil kekayaan merupakan kekuatan penopang utama Indonesia dalam hal perdagangan internasional. Akan tetapi, hal tersebut tidak didukung dengan tingkat SDM dan infrastruktur yang memadai yang membuat Indonesia memiliki kecenderungan menjadi negara penjual bahan mentah dengan harga jual yang lebih rendah. Prinsip politik Indonesia baik politik dalam negeri maupun luar negeri mengacu pada ideologi Pancasila dan dasar hukum UUD 1945.

Prinsip politik Indonesia berorientasi pada kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat yang dilaksanakan oleh pemerintah yang telah dipilih pula oleh rakyat, dan dilaksanakan melalui demokrasi yang adi, jujur, dan terbuka. Politik luar negeri Indonesia berprinsip bahwa kebijakan harus diarahkan untuk sebesar-besarnya kepentingan nasional dan bersifat bebas dan aktif. Indonesia diarahkan untuk menjadi aktor dunia yang aktif dalam segala bentuk kerjasama internasional yang salah satunya dalam bidang perdagangan sebagai bentuk upaya menjaga perdamaian dunia sekaligus mengejar kepentingan nasional di politik internasional. (Kartadjoemena, 2002; Mas'ood, 2007).

PEMBAHASAN

Pelaksanaan ACFTA Di Indonesia

ACFTA mulai berlaku resmi pada 1 Januari 2010 antara China dengan ASEAN-6 yaitu untuk Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Sementara tahun 2015 berlaku bagi China dengan ASEAN-4 yaitu Kamboja, Vietnam, Laos, dan Myanmar. Legalitas pelaksanaan ACFTA di Indonesia berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004.

Indonesia menghadapi beberapa tantangan dalam pelaksanaan ACFTA, yaitu efisiensi dan efektifitas produksi, iklim usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing, ketentuan dan peraturan investasi yang transparan, efisien, dan ramah dunia usaha, serta kemampuan dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk promosi pemasaran dan lobi. Indonesia juga menemui beberapa hambatan dalam pelaksanaan ACFTA, seperti munculnya resistensi dari berbagai kelompok industri dalam negeri yaitu KADIN, USIA, API, APINDO, KOBAR, OPSI, KSPSI, dan Jamsostek. Pertentangan juga terjadi di pemerintahan antara Menteri Perindustrian dengan Menteri Perdagangan dan muncul tuntutan renegotiasi yang dipicu oleh DPR khususnya dari Komisi VI.

Pertimbangan utama Indonesia mengenai keikutsertaan dalam ikatan regionalisme ACFTA yaitu untuk mengincar pangsa pasar yang jauh lebih besar di China untuk berbagai komoditi Indonesia. Keikutsertaan dalam ACFTA diharapkan akan menghasilkan surplus neraca perdagangan yang lebih besar bagi Indonesia. Data-data Kementerian Perdagangan Republik Indonesia justru berlawanan dengan tujuan tersebut. Data-data tersebut menunjukkan bahwa nilai

total perdagangan Indonesia terus meningkat dengan nilai tren pertumbuhan ekspor sebesar 13.86%. Akan tetapi, pertumbuhan tersebut tidak sebanding dengan peningkatan tren pertumbuhan impor yang sebesar 19.54%.

Data-data tersebut juga menunjukkan bahwa ketika Indonesia makin banyak terlibat dalam segala bentuk kerjasama perdagangan yang salah satunya ACFTA, tidak serta merta membuat Indonesia mampu memanfaatkan meluasnya pangsa pasar produk dalam negeri, yang terjadi justru produk impor lebih banyak beredar di Indonesia.

Implikasinya Terhadap Ketahanan Keamanan Nasional

Pandangan tentang keamanan nasional sudah tidak dapat lagi berkuat pada isu high politics yang hanya sebatas pada pembahasan tentang peperangan fisik atau perlombaan senjata antar bangsa. Konsep keamanan pada masa kini tidak hanya mengenai ancaman degradasi wilayah kedaulatan tetapi juga terhadap nilai kedaulatan itu sendiri yaitu menentukan kebijakan nasional secara mandiri tanpa adanya campur tangan dan tekanan dari asing. Jalan yang dipilih untuk menguasai negara lain tidak lagi didominasi oleh cara militer namun bergeser ke arah kerjasama ekonomi. Ekonomi tidak lagi tentang pengumpulan kekayaan tetapi juga menjadi alat politik untuk mempengaruhi bahkan menguasai negara lainnya. Dalih kerjasama ekonomi merupakan jalan untuk mendapatkan legitimasi negara yang lebih besar untuk menekan kedaulatan negara lainnya agar sejalan dengan kepentingan negara besar tersebut (Winarno; 2010).

Pergeseran paradigma dan ancaman keamanan tersebut membuat kemandirian

ekonomi menjadi benteng pertahanan bagi sebuah negara untuk mempertahankan kedaulatannya dari berbagai bentuk tekanan asing. Kerjasama perekonomian internasional menjadi ancaman bagi kedaulatan pemerintahan nasional sekaligus sebagai prospek untuk meningkatkan kekuatan politik seperti yang terjadi di Asia Timur terutama di China (Buzan, 1991; Fukuyama, 2006). Pelaksanaan ACFTA telah menimbulkan beberapa dampak negatif bagi perekonomian Indonesia, yaitu dominasi barang produksi China di pasar Indonesia, industri komoditi nasional terpukul dan meningkatkan ancaman deindustrialisasi, serta peningkatan laju pengangguran karena para produsen industri yang terpukul terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja untuk menjaga margin keuntungan. Indonesia berhak menilik kembali bahkan membatalkan bentuk kerjasama tersebut jika masih menjadi aktor tunggal dalam proses pengambilan kebijakan karena pelaksanaan ACFTA telah melemahkan nilai ketahanan ekonomi nasional. Akan tetapi, pelaksanaan regionalisme seperti ACFTA menuntut adanya keseragaman mekanisme dan kebijakan antara negara-negara anggota yang terlibat di dalamnya. Indonesia yang terikat secara resmi dalam perjanjian tersebut dan mengesahkannya dalam bentuk kebijakan nasional, maka pada saat itu pula Indonesia menyerahkan sebagian wewenang kedaulatannya yaitu wewenang pemerintah nasional untuk menentukan kebijakan nasional ke dalam suatu ikatan yang lebih besar antar bangsa yang membuat Indonesia tidak lagi menjadi aktor tunggal dalam proses pengambilan kebijakan dalam negeri.

Degradasi kekuasaan dan kedaulatan pemerintah nasional untuk mengambil

kebijakan semata berdasarkan kepentingan nasional merupakan implikasi utama dari pelaksanaan regionalisme ACFTA terhadap ketahanan keamanan nasional. Keterikatan Indonesia pada perjanjian regionalisme tersebut membuat Indonesia tidak lagi mempunyai wewenang dan kedaulatan sebebaskan sebelumnya dalam memutuskan kebijakan nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa status Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat tidak lagi menjadi jaminan untuk menentukan nasibnya sendiri. Indonesia tidak dapat lagi mendominasi proses pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan nasional yang cedera setelah pelaksanaan ACFTA, karena telah terlibat dalam ikatan perjanjian resmi antar negaranegara anggota di dalamnya yang juga mengikat kepentingan antar anggota.

SIMPULAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan didukung dengan jumlah penduduk yang banyak membuatnya menjadi negara dengan potensi besar di bidang industri yang dapat memaksimalkan jumlah komoditi unggulan. Lebih-lebih didukung dengan prinsip Indonesia sebagai negara yang turut aktif dalam perdamaian dunia dengan keikutsertaannya di berbagai kerjasama internasional. Hal ini membuat negaranegara merasa nyaman dan percaya untuk menjalin kerjasama khususnya dalam bidang perdagangan seperti ACFTA.

Pelaksanaan ACFTA menghasilkan angka konstan negatif untuk neraca perdagangan antara Indonesia-China yang ditunjukkan dengan produk China yang lebih banyak beredar di Indonesia daripada sebaliknya. Produk China yang mendominasi pasar Indonesia

memunculkan berbagai dampak negatif yang mengancam terjadinya deindustrialisasi nasional sekaligus meningkatkan angka pengangguran karena produk dalam negeri kalah bersaing dengan produk dari China di pasaran.

Mekanisme perdagangan bebas seperti ACFTA dapat mempengaruhi ketahanan keamanan negara dari segi nilai kedaulatan pemerintahan nasional karena pelaksanaannya menuntut adanya keseragaman kebijakan antar negara-negara anggota. Mekanisme perdagangan bebas ini menimbulkan implikasi terhadap nilai kedaulatan dan wewenang pemerintah nasional dari negaranegara yang terlibat di dalamnya termasuk Indonesia menjadi berkurang karena Indonesia tidak lagi menjadi aktor tunggal dalam menentukan kebijakan dalam negerinya sendiri. Kerjasama perdagangan bebas juga mengandung prospek positif untuk mendukung ketahanan nasional. Hal ini dapat dilihat dari kesuksesan negara-negara Asia Timur terutama China yang memperbaiki kebijakan nasional untuk mendukung peningkatan daya saing nasional ketika mengikuti mekanisme keterbukaan ekonomi. Kemampuan daya saing nasional akan menjadi penopang kemandirian nasional serta mengurangi ketergantungan terhadap asing dan menjadikan ekonomi sebagai alat politik yang nantinya akan meningkatkan posisi tawar Indonesia. ACFTA juga akan menjadi prospek bagi Indonesia untuk meningkatkan kekuatan diplomasi di berbagai forum internasional karena adanya hubungan persahabatan politik lebih rendah, mengurangi kompleksitas prosedur perizinan usaha dan industry, merencanakan pembangunan nasional yang berorientasi pada infrastruktur antar pulau, dan melakukan perbaikan teknologi

serta infrastruktur terutama untuk Usaha Kelas Menengah (UKM).

Menyempurnakan Standard Operating Procedure (SOP) atau prosedur serta tata cara proses pembentukan prapersetujuan dalam berbagai perjanjian dengan diskusi dan sosialisasi yang lebih intensif pihak stakeholder yang akan bersentuhan langsung terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama sebelum masuk secara resmi ke mekanisme kerjasama tersebut.

Mengembangkan iklim diskusi perkembangan paradigma terbaru dunia tentang permasalahan hubungan antara ekonomi, politik, dan keamanan yang dilakukan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Buzan, Barry. 1991. *People, States & Fear: The National Security Problem in International Relations* (second edition). London: Wheatsheaf Books
- Fukuyama, Francis. 2006. *State Building: Governance and World Order in the 21st Century*. edisi Bahasa Indonesia Memperkuat Negara: Tata
- Kartadjoemena, H.S. 2002. *GATT dan WTO-Sistem Forum, dan Lembaga Internasional Di Bidang Perdagangan*. Jakarta: UI Press.
- Lemhannas. tt. *Konsepsi Dan Tolak Ukur Ketahanan Nasional*. Jakarta: Penerbit Lemhannas
- Mas'ood, Mohtar. 1994. *Ekonomi-Politik Intenasional Dan Pembangunan* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____, 1998. Tantangan Global Masa Kini,. dalam Ichlasul Amal.. & Armaidly Armawi. 1998. *Regionalisme*.

- Nasionalisme. Dan Ketahanan Nasional.*
Yogyakarta: Gama University Press.
- Mas'ood, Mohtar & Siti Muthia Setyawati.
2007. *Making Sense of International
Politics by Using The Level Of Analysis.*
dalam Mata Kuliah Pengantar Ilmu
- Hubungan Internasional.* Yogyakarta:
Universitas Gadjah Mada.
- Stiglitz, Joseph. 2002. *Globalization and Its
Discontents.* W.W. Norton & Company :
New York And London.
- Winarno, Budi. 2010. *Melawan Gurita
Neoliberalisme.* Jakarta: Pt. Erlangga.